**Hikmatina**: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
e-ISSN: 2655-8831

# PENERAPAN KAIDAH USHUL FIQH DALAM REKOMENDASI DISPENSASI KAWIN : TELAAH PERTIMBANGAN KEMASLAHATAN DI PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Fauziah Ma'rifatul Aulia[1], Shofiatul Jannah[2], Syafi'atul Mir'ah[3]
Universitas Islam Malang
e-mail: [1]22101012050@unisma.ac.id, [2] shofia@unisma.ac.id,
[3]syafiatulmirah@unisma.ac.id

**Abstrak**

*Pentingnya mempertimbangkan kemanfaatan dalam putusan dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama. Dispensasi kawin yang diberikan kepada anak di bawah umur tidak hanya menyangkut aspek legal-formal, tetapi juga harus memperhatikan asas maqashid syariah, yang menitikberatkan pada perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan kehormatan. Banyaknya permohonan dispensasi yang didasari tekanan sosial atau kehamilan di luar nikah berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar apabila tidak disertai dengan kesiapan psikologis, emosional, dan ekonomi calon pengantin. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan kemaslahatan agar putusan yang diambil benar-benar memberikan kemanfaatan dan mencegah kerusakan sosial. Dengan demikian, peran hakim bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai syariah dan kemanusiaan.*

**Kata kunci:** *Dispensasi Kawin, kaidah ushul fiqh, pertimbangan kemaslahatan*

**Abstract**

*The importance of considering the merits in the marriage dispensation decision by the judge of the Religious Court. The marriage dispensation given to minors is not only related to legal-formal aspects, but must also pay attention to the principles of sharia maqashid, which emphasizes the protection of soul, intellect, descent, and honor. The large number of dispensation requests based on social pressure or out-of-wedlock pregnancy has the potential to have a greater impact if it is not accompanied by the psychological, emotional, and economic readiness of the bride-to-be. Therefore, judges need to consider the benefits so that the decisions taken really provide benefits and prevent social damage. Thus, the role of judges is not only as a law enforcer, but also as a guardians of sharia and humanitarian values.*

**Keywords:** *Marriage dispensation, ushul fiqh rules, consideration of benefits*

## A. Pendahuluan

Menurut Hukum Asal, pernikahan sunah adalah anjuran dan merupakan salah satu sunah Nabi Muhammad SAW dalam bentuk anjuran bagi mereka yang sudah mampu berempati satu sama lain dan tidak memiliki keinginan untuk terlibat dalam

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

aktivitas seksual. Menikah bagian dari sarana ibadah kepada Allah SWT dan bernilai pahala jika dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan berdampak positif pada kesehatan fisik dan mental, serta keselamatan dunia dan akhirat yang teratur. Ajaran Islam didasarkan pada azaz yang kuat dan kokoh, yang dimaksudkan untuk menegakkan bathin lahir yang ulet, harmonis, dan bahagia, yang mungkin merupakan puncak kehidupan duniawi hingga kehidupan akhirat.

Kehidupan keluarga umat Islam kontemporer problematis karena menyangkut persoalan "kehidupan modern". Di era modernisasi ini, terdapat beberapa godaan yang membantu masyarakat meningkatkan kualitas hidupnya melalui teknologi informasi. Dalam Islam, "Pernikahan" dapat diartikan antara ibadah dan menuju keselamatan atau kemaslahatan mengacu pada sesuatu yang baru dan mendesak yang harus dipahami, mengingat pesatnya kemajuan informasi dan teknologi yang lebih mencerminkan kesenangan duniawi sekaligus memahami tujuan peran dan keluarga. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia berdasarkan asas selamanya. Ciri khas Islam yaitu, bahwa setiap prinsip yang harus diikuti oleh umat beriman telah ditetapkan oleh agama, dan terdapat hikmah yang berasal dari prinsip-prinsiptersebut. Menikah, juga termasuk perintah Allah sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya :

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِۗ

اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَۙ

*Artinya:"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagiku dari pasanganmu,serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (Q.S An-Nahl:72)*

Ayat tersebut mengajarkan pentingnya mensykuru nikmat Allah tidak hanya dengan ucapan, melainkan juga dengan perbuatan yang mencerminkan rasa hormat dan bakti kepada-Nya. Dengan penjelasan tersebut, maka dapat diartikan tujuan utama dalam pernikahan adalah memelihara dan menjauh dari fitnah-fitnah dunia. (Malisi, 2022)

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menurut hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan usia minimal untuk menikah bagi wanita dan pria adalah 19 tahun sebagai sarana untuk melindungi anak-anak dan mencegah memburuknya hubungan rumah tangga. Namun, faktanya menunjukkan bahwa dispensasi kawin masih cukup rendah, terutama di pengadilan agama. Hal ini menunjukkan bahwa

pernikahan masih sering dilakukan tanpa banyak pertimbangan, baik dari segi mental, usia, maupun pemahaman tujuan dan hakikatnya. Pernikahan membutuhkan kekuatan fisik dan emosional, oleh karena itu pernikahan merupakan bagian dari segala sesuatu yang sakral dan dapat membantu orang menjalani kehidupan terbaik mereka dan terlibat dalam semua kegiatan yang bermanfaat sesuai dengan hukum Islam. (Nurliana, 2022)

Permohonan dispensasi kawin sering disebut sebagai alternatif dalam kehidupan masyarakat umum untuk memperlancar kegiatan yang berkaitan dengan perkawinan dibawah umur, tak lain karena semakin seringnya pengajuan permohonan dispensasi kawin, dan masyarakat umum sering mengamati bahwa proses pengajuan di Pengadilan Agama lebih mudah dan cenderung dikabulkan oleh hakim. (Ikawati & Anisa, 2023)

Terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama mencerminkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan pernikahan yang sesungguhnya, yakni mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Disebutkan dengan jelas, bahwa adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi anak dan perempuan harus menjadi upaya preventif terhadap praktik usia dini yakni terhadap kasus dispensasi kawin. Salah satu penyebab utamanya adalah banyaknya orang yang tidak memahami pernikahan dan banyaknya orang yang percaya bahwa pernikahan akan lebih baik dilakukan ketika usia muda. Akibatnya, banyak orang yang tidak memahami hakikat kekerasan terhadap anak dan akhirnya menempatkan anak-anak mereka dalam situasi yang sulit. Maka, banyak hal yang terjadi pada anak-anak atau wanita muda dalam situasi ini. Mereka percaya bahwa setelah terjadi perubahan signifikan pada fisik seorang wanita, maka sudah seharusnya dinikahkan tanpa memikirkan dampak atau *mudharat* yang terjadi dari fenomena pernikahan di usia dini.

Minimnya pemahaman masih terkait dengan efek yang akan dialami anak selama hidupnya, serta tindakan orang tua yang lalai dalam memberikan perlindungan dan bimbingan kepada anak yang hidupnya hal-hal tersebut merupakan bagian dari keberadaan umat manusia. Pengaruh budaya yang ada dilingkungan anak juga menjadi alasan bagi anak untuk terlibat dalam dini perikahan, persepsi, dan anggapan bahwa anak sudah cukup pantas untuk melangsungkan pernikahan. (Indawati et al., 2024)

Terkait dengan kasus permohonan dispensasi kawin, hakim memiliki kwenangan untuk menerima atau bahkan menghentikan proses pengajuan permohonan dispensasi kawin. Hakim pengadilan agama dalam menetapkan

putusan perkara dispensasi kawin dengan bukti bahkan dalil sebagaimana dinyatakan pemohon, putusan tersebut menggunakan dasar hukum. Adapun majelis hakim tidak hanya memakai sumber hukum undang-undang saj, melainkan sumber hukum Islam juga salah satunya yaitu kaidah ushul fiqh. Ketika hakim telah mendengarkan alasan dan bukti dari pemohon, majelis hakim akan memberikan nasihat kepada para pemohon supaya menjaga dari melanggar syari'at. (Rohmatzzuhriyah et al., 2022)

Faktor-faktor yang menentukan dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi kawin tidak semata-mata didasarkan pada aspek yuridisme, mmelainkan juga mempertimbangkan faktor-faktor penting lainnya, seperti kemaslahatan calon pengantin dan hal-hal tersebut juga disertai dengan keyakinan hakim atas putusan yang diberikan. (Firdaus & Lubis, 2022)

Dalam Islam, memang tidak ada ketentuan usia seseorang yang dikatakan dewasa, hanya dibedakan berdasarkan mimpi basah untuk laki-laki dan haid untuk perempuan. Dalam Islam, batas usia tidak menjadi persyaratan untuk menikah, hal ini dapat dilihat dari sebagian besar orang yang melaksanakan akad (mepelai laki-laki dan perempuan di syaratkan) memiliki kecakapan murni, yaitu baligh, berakal, dan sehat. Namun ajaran Islam tidak menjelaskan secara jelas mengenai umur, akibatnya banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap terjadinya fenomena kasus dispensasi kawin, karena beranggapan sudah sesuai dengan syari'at Islam. Akan tetapi tidak menyadari bahwa mengutamakan kemaslahatan juga bagian dari syari'at Islam.

Beberapa faktor yang mengakibatkan adanya ajuan dispensasi kawin yaitu bebasnya pergaulan yang dapat mengakibatkan terjadinya hubungan seks di luar nikah yang marak di masyarakat dan berdampak besar. Di sisi lain, dalam Perkawinan Undang-undang dijelaskan bahwa pernikahan diperbolehkan jika pria dan wanita telah memasuki usia perkawinan yakni 19 tahun. (Firdaus & Lubis, 2022)

Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis terhadap pentingnya penerapan ushul fiqh dalam dispensasi kawin untuk memastikan bahwa setiap keyakinan agama yang didasarkan pada hukum Islam tidak hanya konsisten dengan hukum positif tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan, yang merupakan tujuan utama hukum Islam. Kaidah ushul fiqh mengacu pada prinsip-prinsip dasar yurisprudensi Islam yang memandu interpretasi dan penerapan hukum Islam. Ini membantu dalam memperoleh putusan hukum dari sumber- sumber utama, Al-Qur'an dan Sunnah, memastikan pendekatan terstruktur untuk penalaran hukum. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip

fiqhiyyah, umat Islam dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan selaras dengan ajaran Islam di semua bidang kehidupan mereka. Ruang lingkup qawaid fiqhiyyah juga membahas tentang keterkaitan prinsip hukum Islam dengan konsep keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Isu-isu fiqih yang dibahas dalam ruang lingkup qawaid fiqhiyyah meliputi isu-isu seperti ibadah, muamalah, akhlak, dan isu-isu lain yang terkait dengan kehidupan sehari-hari umat Islam. Jika mempertimbangkan dunia modern, qawaid fiqhiyyah berfungsi sebagai pedoman yang dapat dimodifikasi untuk mengakomodasi ide-ide kontemporer, sehingga relevan dan konsisten dengan prinsip-prinsip dasar Islam. (Adly et al., 2024)

Hakim tidak boleh hanya mempertimbangkan aspek formal dispensasi kawin, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi umat kemaslahatan (maslahah) secara komprehensif. Karena itu, penerapan ushul fiqh kaidah-kaidah sangat relevan sebagai pendekatan normatif untuk menentukan apakah dispensasi kawin yang diberlakukan bermanfaat (maslahah) atau justru berisiko menimbulkan kerusakan (mafsadat) di masa mendatang.

## B. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan informasi dari penelitian atau narasumber untuk melakukan analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi secara langsung dari hakim maupun staff pengadilan agama, kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman mengenai proses pengadilan, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan mengadili perkara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstual dan konseptual. Pendekan kontekstual tersebut dapat mendukung atau menambah kejelasan makna terhadap situasi yang ada. (Afriani & Wijaya, 2021) Pendekatan ini lebih fokus terhadap memahami bagaimana kaidah *ushul fiqh* diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks spesifik di Pengadilan Agama Mojokerto. Sedangkan, pendekatan konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep-konsep atau teori-teori hukum yang relevan dalam rangka memahami dasar pemikiran atau prinsip yang melandasi praktik perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto.

Lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Agama Mojokerto yang terletak di Jl. Prajurit Kulom No. 17 , Mergelo, Prajurit Kulon, Kota Mojokerto , Jawa Timur. Lokasi tersebut dipilih karena Mojokerto memiliki angka kasus permohonan dispensasi kawin yang cukup signifikan serta memiliki latar belakang sosial budaya yang mempengaruhi pertimbangan Pengadilan Agama dalam permohonan dispensasi kawin. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data

primer diperoleh dari informan lembaga tersebut yaitu Hakim dan salah satu staff Pengadilan Agama Mojokerto. Data sekunder berasal dari dokumen hukum, buku, jurnal akademik, peraturan undang-undang yang relvan, dan artikel.

Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi untuk mengamati objek penelitian secara langsung. Wawancara dilakukan dengan Hakim dan salah satu staff Pengadilam Agama Mojokerto, sedangkan dokumentasi berupa dokumen putusan resmi yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif Miles-Huberman dan Saldana, yaitu berupa kondensasi data, penyajian data, vertifikasi atau kesimpulan data. Kondensasi data meliputi data yang dikumpulkan dari tinjauan literature dan dikompilasi untuk fokus pada informasi penting yang relvan. (Suwarno, 2023) kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, dan selanjutnya datata divertifikasi dan perikan kesimpulan sesuai dengan hasil yang diperoleh. Untuk menjaga keabsahan data, teknik yang digunakan peneliti yaitu triangulasi, yang menggunakan hal-hal lain yang termasuk dalam data untuk menentukan perlunya penyelidikan lebih lanjut atau sebagai pembanding dengan data. Triangulasi sumber data digunakan untuk membandingkan data dari berbagai pihak guna meningkatkan keadbasahn dan menghindari bias, sedangkan triangulasi teori yaitu penggunaan datu atau lebih teori untuk menganalisis data agar hasil penelitian lebih mendalam dan objektif.

## C. Hasil dan Pembahasan

Pengadilan Agama Mojokerto menangani sejumlah kasus dispensasi kawin setiap tahunnya, hal ini menunjukkan dinamika sosial dan budaya pada wilayah tersebut. Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto umumnya diajukan dengan alasan-alasan mendesak seperti terjadinya kehamilan diluar nikah, hubungan yang sudah lama dijalin antara pasangan muda, telah menikah secara agama (nikah siri) yang belum diakui oleh negara, dan adanya perjodohan yang diharuskan secara adat. Alasan-alasan tersebut sering kali didorong oleh tekanan sosial dan budaya semata hanya untuk menjaga nama baik keluarga dan menghindari aib masyarakat.

Oleh karena itu, dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto setiap pemohon diharuskan mematuhi prosedur dan memenuhi syarat-syarat yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepastian dan kepatuhan terhadap hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan.

Dispensasi kawin merupakan pengecualian terhadap batas usia minimal pernikahan. (Abid et al., 2024) Sehingga perlu melalui proses hukum yang sah agar

tidak menimbulkan pelanggaran hukum. Selain itu, prosedur ini bertujuan untuk melindungi hak anak, terutama agar mereka tidak menjadi korban pernikahan paksa atau pernikahan yang memiliki mudharat terhadap masa depan mereka.

Dalam hukum Islam, dispensasi perkawinan dipertimbangkan dengan menitikberatkan pada kemaslahatan anak, norma sosial, dan persetujuan orang tua. Kesejahteraan anak menjadi fokus utama, termasuk dampak jangka panjang secara psikologis, sosial, dan ekonomi. Norma sosial dan budaya turut diperhatikan, termasuk pandangan masyarakat tentang usia layak menikah. Persetujuan orang tua, khususnya ibu, dianggap penting untuk memastikan kesiapan anak. Hakim harus mempertimbangkan urgensi, manfaat hukum, serta potensi risiko, dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan dan kebaikan dalam Islam, agar tidak merugikan anak. (Sutisna et al., 2024)

Dalam konteks ini, para ulama ushul fiqh mengembangkan konsep maslahah sebagai salah satu metode istinbat hukum, yaitu upaya menggali dan menegakkan hukum dari nash (teks syariat) dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat manusia. Secara etimologis, maslahah berarti segala sesuatu yang membawa kebaikan dan manfaat, serta menjadi lawan dari mafsadah, yaitu keburukan atau kerusakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak hanya bertumpu pada teks secara literal, melainkan juga pada semangat di baliknya yang berorientasi pada tercapainya kebaikan umum dan perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (maqashid al-syari'ah): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Prinsip maslahah ini kemudian juga menjadi landasan penting dalam pertimbangan hakim di pengadilan. Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim tidak hanya memahami bunyi undang-undang formal atau aturan hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas bagi pihak-pihak yang berperkara dan masyarakat secara umum. Pertimbangan ini mencakup aspek keadilan substantif, moralitas, serta dampak sosial dari keputusan yang diambil.Misalnya, dalam perkara perkara yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan tertulis, hakim dapat menggunakan asas kemaslahatan sebagai dasar dalam menafsirkan hukum dan menerapkan keadilan yang lebih kontekstual. Hal ini mencerminkan bahwa hukum, baik dalam syariat Islam maupun dalam sistem peradilan modern, tidak bersifat kaku, melainkan fleksibel dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, maslahah bukan hanya menjadi metode dalam fikih, tetapi juga prinsip yang relevan dalam praktik yudisial, terutama dalam menciptakan keadilan yang diwajibkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan bersama. (Cholili et al., 2024)

Dari temuan penelitian diatas, maka terdapat fokus penelitian yang dibahas yaitu:

**1. Penerapan Kaidah *Ushul Fiqh* dalam Permohonan dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Mojokerto**

Batas usia minimum untuk melangsungkan pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan hanya menikah jika telah berusia minimal 19 tahun. Ketentuan ini merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 7 ayat 1. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kesiapan lahir dan batin menjadi syarat penting bagi calon suami dan istri agar tujuan pernikahan dapat tercapai secara optimal baik dalam membangun rumah tangga yang harmonis, mencegah terjadinya perceraian, maupun dalam melahirkan keturunan yang sehat secara fisik dan mental. Dengan demikian, penggelaran usia minimal tersebut menjadi langkah strategi yang diambil pemerintah guna menekan berbagai risiko yang muncul akibat pernikahan dini. Penetapan usia ini bukan semata-mata bersifat administratif, melainkan juga mencerminkan perlindungan terhadap hak anak dan upaya menciptakan keluarga yang lebih stabil serta berkualitas. (Arofik & Yustomi, 2020)

Kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan agama dalam memberikan dispensasi kawin tidak hanya didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus disertai dengan pertimbangan yang komprehensif oleh hakim, salah satunya adalah aspek kemaslahatan. Dalam perkara dispensasi kawin, baik keputusan untuk mengabulkan maupun menolak permohonan sama-sama berpotensi menimbulkan mudarat, terutama karena risiko yang melekat pada pernikahan usia dini. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk memberikan putusan yang paling minim dampak negatifnya, dengan menghindari kemudaratan yang lebih besar dan memilih jalan yang memberikan risiko paling ringan bagi anak yang bersangkutan. (Mesraini et al., 2020)

Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam beberapa kaidah fiqh berikut:

الضَرَرُ لاَ يُزَالُ بِالضَرَرِ

*Artinya: "Kemudharatan tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain."*

Kaidah ini mengajarkan bahwa menyelesaikan suatu permasalahan tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar. (Ishak, 2020) Dalam konteks dispensasi pernikahan, menikahkan anak di bawah umur demi menghindari tekanan sosial atau untuk menutupi kehamilan di

luar nikah, apabila dilakukan tanpa mempertimbangkan kesiapan mental, fisik, dan ekonomi, justru bisa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar. Risiko seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dini, serta kesulitan ekonomi dapat menjadi konsekuensi nyata dari keputusan tersebut.

Kaidah kedua, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan."*

Kaidah ini menegaskan bahwa apabila harus memilih antara menghindari kerusakan dan meraih manfaat, maka prioritas diberikan untuk pencegahan kerusakan. (Setiawan, 2024) Dalam kasus pernikahan dini, meskipun terdapat manfaat jangka pendek seperti menghindari aib atau menyelamatkan nama baik keluarga, namun jika mudaratnya jauh lebih besar, seperti trauma psikologis dan ketidakstabilan rumah tangga, maka penolakan terhadap dispensasi menjadi pilihan yang lebih tepat dan sejalan dengan prinsip syariat.

Kaidah ketiga, berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

*Artinya: "Jika terdapat dua kemudharatan yang saling bertentangan, maka yang lebih besar dampaknya harus dihindari dengan mengambil yang lebih ringan."*

Kaidah ini merupakan kaidah turunan "addhararu yuzalu" yang menegaskan dalam keadaan darurat, dimana terdapat dua bahaya yang tidak dapat dihindari, maka hendaknya memilih bahaya yang lebih ringan untuk menghindari bahaya atau resiko yang lebih besar. (Ulil Albab, M. and Hamidah, 2024)

Dalam praktiknya, hakim sering kali dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama tidak ideal: mengabulkan dispensasi dengan risiko pernikahan dini, atau menolak dan berhadapan dengan kemungkinan munculnya perzinaan atau tekanan sosial. Dalam kondisi seperti ini, kaidah tersebut memberikan arahan agar hakim memilih opsi dengan dampak negatif yang paling ringan. Tentu, hal ini perlu didasarkan pada analisis yang mendalam atas fakta-fakta lapangan, kondisi psikologis pemohon, masukan dari tenaga ahli seperti psikolog, serta pertimbangan sosial dan budaya setempat.

Kaidah keempat, yaitu :

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وُجُودًا وَعَدَمًا

*Artinya: "Hukum itu berputar (berubah) sesuai dengan 'illat (sebab atau alasan hukumnya), ada tidaknya hukum bergantung pada ada tidaknya 'illat."*

Dalam praktik rekomendasi dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto menunjukkan pentingnya 'illat (alasan hukum) dalam penentuan kebolehan atau penolakan suatu permohonan. Kaidah ini mengandung makna bahwa hukum akan selalu mengikuti ada atau tidaknya 'illat. Dalam konteks dispensasi kawin, yang dimaksud dengan 'illat adalah adanya kebutuhan mendesak atau kemaslahatan yang kuat, seperti kehamilan diluar nikah, atau kondisi psikologis dan sosial yang mengharuskan pernikahan dilakukan meskipun usia belum mencapai batas minimal yang telah ditentukan dalam undang-undang, yaitu 19 tahun menurut UU No.16 Tahun 2019.

Di Pengadilan Agama Mojokerto, dispensasi kawin diberikan apabila terdapat alasan-alasan kuat yang dianggap memenuhi unsur 'illat tersebut. Sebagai contoh, apabila seorang anak perempuan terbukti hamil diluar nikah, dan pernikahan dinilai sebagai jalan terbaik untuk menjaga kehormatan keluarga dan status nasab anak, maka hakim cenderung mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Hal ini mencerminkan bahwa hukum diperbolehkannya menikah pada usia dini berlaku karena 'illat –nya ada. Sebaliknya, jika permohonan diajukan tanpa adanya alasan mendesak, misalnya pasangan masih terlalu muda secara psikologis, belum memiliki kesiapan ekonomi, maka pengadilan dapat menolak permhonan tersebut karena 'illat-nya dianggap tidak terpenuhi. Dengan demikian, hukum dispensai kawin menjadi tidak berlaku. Oleh karena itu, penerapan kaidah ini menjadi cerminan pendekatan dinamis antara teks hukum, konteks sosial, dan prinsip keadilan substantive berbasis kemaslahatan.

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum diberlakukan jika alasan hukumnya ('illat) ada, dan tidak diberlakukan jika alasannya ('illat) tidak ada.

Kaidah kelima, yaitu :

تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الأَزْمِنَةِ وَالأَمْكِنَةِ وَالأَحْوَالِ

*Artinya: "Perubahan hukum mengikuti perubahan zaman, tempat, dan keaadan."*

Kaidah tersebut menegaskan bahwa hukum-hukum furu' (cabang) dalam Islam dapat mengalami penyesuaian atau perubahan ketika terdapat perubahan

zaman dikarenakan kondisi sosial, budaya, ekonomi yang berubah, ketika berubahnya suatu tempat karena adanya perbedaan adat, kebiasaan, atau sistem hukum local, dan keadaan yang berubah seperti dalam keadaan darurat, kebutuhan, atau bahaya. Meskipun Undang-Undang menetapkan usia minimal kawin 19 tahun, pengadilan dapat memberikan dispensasi jika terdapat kondisi khusus, seperti kehamilan diluar nikah, kesiapan psikologis, atau tekanan sosial yang kuat. Hal ini menujukkan bahwa hukum tidak bersifat kaku, tetapi menyesuaikan dengan relitas sosial yang berubah. Pertimbangan kemaslahatan menjadi dasar utama perubahan tersebut, sehingga keputusan yang diambil tetap relevan dengan konteks masyarakat Mojokerto.

Peneliti menyimpulkan bahwa dengan mengaplikasikan kaidah-kaidah fiqh sebagai landasan utama dalam pertimbangan hakim, maka hakim di Pengadilan Agama tidak hanya terbatas pada penerapan hukum positif, melainkan juga mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan (maslahah) bagi para pihak yang bersangkutan.

**2. Pertimbangan Kemaslahatan dalam Keputusan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mojokerto**

Penerapan kaidah ushul fiqh dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojokerto menjadi salah satu instrumen bagi hakim untuk memutuskan diberikan atau tidaknya dispensasi kawin tersebut, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat mencapai kemaslahatan bagi semua pihak yang terkait.

Pernikahan anak atau dispensasi nikah berdampak serius terhadap anak di bawah umur. Banyak masyarakat yang belum memahami konsekuensi dari praktik ini, yang mencakup:

a. Psikologis

Anak belum matang secara emosional dan mental, sehingga belum siap menjalani tanggung jawab pernikahan, yang berisiko menimbulkan konflik. Kondisi psikis sesorang trntunya berbeda-beda, tergantung terhadap latar belakang kehidupannya. Dalam pertimbangan hakim memberikan keputusan pada perkara dispensasi kawin, psikis menjadi salah satu aspek dari pertimbangan tersebut. Dalam hal ini di Pengadilan Agama Mojokerto terdapat lembaga P2TP2A ( pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak ) yang membantu hakim dalam memberikan pendampingan, dukungan, mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan, serta memberikan iformasi dan edukasi. Dari proses-proses tersebut yang nantinya akan terdapat pernyataan direkomendasikan atau tidaknya pasangan untuk menikah, kemudian dari pernyataan P2TP2A akan menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin.

b. Kesehatan

Anak-anak, terutama perempuan, berisiko tinggi mengalami gangguan reproduksi, komplikasi kehamilan, hingga kematian ibu dan bayi yang justru menjadi mafsadat atau bahaya. Bagi perempuan dibawah umur memiliki resiko tinggi karena termasuk dalam kategori belum siap unyuk hamil serta melahirkan.

c. Rumah Tangga

Ketidakstabilan emosi dan kurangnya kemandirian seringkali memicu konflik dan perceraian dini. Dengan prespektif maslahah, kondisi ini dangat penting untuk menjadi pertimbangan karena bertentangan dengan tujuan utama pernikahan dalam islam, yaitu mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika pernikahan dilakukan dalam keadaan belum matang secara emosional dan mental, maka dikhawatirkan justru malah menimbulkan mafsadah atau kerusakan, baik bagi pasangan, anak, maupun lingkungan sosial.

d. Pendidikan

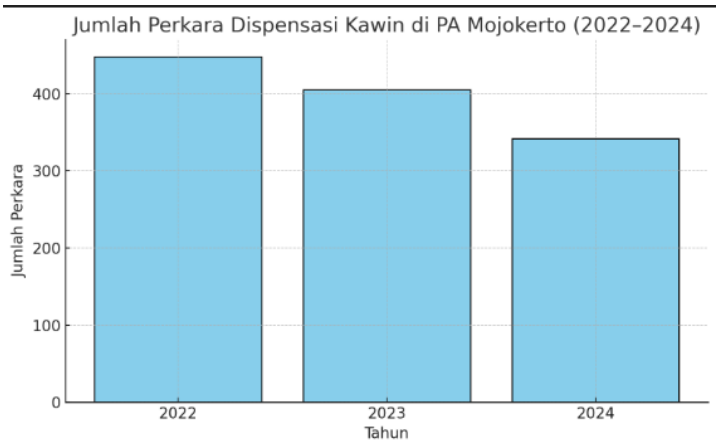
Pernikahan dini sering menyebabkan anak putus sekolah, membatasi masa depan dan peluang ekonomi mereka. Selain itu, rendahnya kualitas pendidikan anak yang menikah dini juga dipengaruhi oleh faktor biaya pendidikan yang cukup tinggi. Anak yang seharusnya masih bersekolah justru terbebani oleh tanggung jawab rumah tangga yang seharusnya menjadi tugas orang dewasa. Kondisi ini memaksa mereka bergantung pada pasangan, sehingga pendidikan terabaikan dan tingkat pencapaian akademik pun menjadi rendah. (Citra Aryaningsih et al., 2024)

Pemberian dispensasi kawin tanpa mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan hanya didasari oleh tekanan sosial, desakan keluarga, atau kehamilan di luar nikah tanpa kesiapan psikologis, emosional, dan ekonomi pasangan, justru berpotensi menjadi "solusi semu" yang menimbulkan kerusakan sosial. Oleh karena itu, pertimbangan kemaslahatan dan prinsip maqashid syariah menjadi pijakan penting bagi hakim dalam mengambil keputusan. Dengan tidak hanya mengacu pada hukum positif, tetapi juga pada nilai-nilai syariat Islam, hakim dapat mencegah terjadinya mudarat, baik bagi pasangan, keluarga, maupun masyarakat luas.

Dari penjelasan yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya pemberian atau penolakan rekomendasi dispensasi kawin oleh hakim pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga menilai apakah permohonan tersebut membawa manfaat atau justru menimbulkan mudarat. Jika dispensasi diberikan, biasanya karena adanya alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah, guna menjaga nasab dan kehormatan keluarga. Sebaliknya, jika permohonan ditolak karena calon mempelai belum matang secara emosional atau belum mandiri,

maka itu juga berbentuk kemaslahatan untuk mencegah kerusakan seperti perceraian dini dengan demikian keputusan hakim selalu diarahkan untuk mewujudkan maslahat sesuai dengan tujuan syari'at Islam.

Berikut data perkara dispensasi kawin yang ditangani di Pengadilan Agama Mojokerto selama 3 tahun terakhir :




Dari grafik tersebut menunjukkan adanya penurunan angka perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Mojekerto, yang mana dapat dipahami sebagai salah satu indicator keberhasilan dari kebijakan prinsip maslahat, menurut ushul fiqh yang telah dijelaskan diatas. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks sosial kontemporer dapat berlajan dengan tujuan syari'ah untuk menegakkan hak asasi manusia.

## D. Simpulan

Dispensasi perkawinan dinilai sah jika memberikan manfaat nyata dan tidak menimbulkan kerugian jangka panjang bagi anak. Hakim harus mengevaluasi dampak psikologis, sosial, dan ekonomi terhadap anak. Selain itu, keputusan hakim harus selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kebaikan dalam Islam.

Norma masyarakat dan adat istiadat berperan sebagai tolok ukur dalam menilai kelayakan usia dan kesiapan melaksanakan pernikahan. Dengan demikian, penerapan kaidah-kaidah ushul fiqh dalam proses pengambilan keputusan dispensasi perkawinan menunjukkan bahwa ini bukan sekadar masalah legalistik, melainkan mencakup perlindungan hak anak dan upaya mewujudkan maqashid al-syari'ah tujuan utama syariat, yaitu menjaga jiwa, akal, dan keturunan. Hakim tidak hanya boleh fokus pada ketentuan-ketentuan hukum secara formal, tetapi juga perlu mempertimbangkan kesiapan mental, emosional, dan kondisi ekonomi calon mempelai dengan mengacu pada prinsip maqashid syariah. Oleh karena itu,

dispensasi kawin sebaiknya diberikan hanya apabila benar-benar memberikan manfaat yang signifikan dan dapat mencegah kerugian atau dampak negatif yang lebih besar.

**Daftar Rujukan**

Abid, S., Putra, A., Anienda, M., & Fitriyah, T. (2024). *A l-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam Implementation of the Marriage Dispensation : Exploring the Legal and Social Complexities in Preventing Early Marriage*. *9*(1), 24–39.

Adly, M. A., Firmansyah, H., & Lubis, I. A. (2024). Qowaid Fiqhiyyah. *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *2*(6), 375–385. https://doi.org/10.55681/armada.v2i6.1363

Afriani, A., & Wijaya, F. (2021). Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual Dalam Study Hadist. *JOURNAL OF ALIFBATA: Journal of Basic Education (JBE)*, *1*(1), 37–54. https://doi.org/10.51700/alifbata.v1i1.91

Arofik, S., & Yustomi, A. R. (2020). Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *4*(1), 111–137. https://doi.org/10.29062/usratuna.v4i01.260

Cholili, A., Muslih, I., Maghfiroh, A., & ... (2024). The Perspective of Maqashid Al-Sharia Theory in the Formulation of DSN Fatwas on Stocks. *Islamic Micro …*, *1*(1), 11–21. https://journal.iai-alfatimah.ac.id/index.php/imfj/article/view/11%0Ahttps://journal.iai-alfatimah.ac.id/index.php/imfj/article/download/11/79

Citra Aryaningsih, N., Ardita Budiono, C., Putri Kurniati, E., Galih Prasetyo, A., & Rofiq, N. (2024). Pengaruh Serta Dampak Implementasi Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *3*(8).

Firdaus, M. F., & Lubis, S. (2022). Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat). *Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, *2*, 160–170. https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies/article/view/596

Ikawati, E., & Anisa, D. (2023). Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Pengadilan Agama Panyabungan. *Palita: Journal of Social Religion Research*, *8*(1), 1–18. https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3198

Indawati, Y., Said, S. U., & Ismaniyah, M. R. (2024). Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Indonesian Journal of*

*Social Sciences and Humanities*, *4*(1), 80–91.

Ishak, S. (2020). Kemudharatan Tidak Harus Dihilangkan dengan Kemudharatan. *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, *7(2)*, 117–126.

Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *1*(1), 22–28. https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97

Mesraini, Rahmatullah, I., & Mahmud, A. A. (2020). Teori Hukum Feminisme Dan Kaidah Fikih Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin. *Palastren*, *13*(1), 139–162. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/69409

Nurliana, N. (2022). Pernikahan dalam Islam Antara Ibadah dan Kesehatan Menuju Keselamatan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, *19*(1), 39–49. https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v19i1.397

Rohmatzzuhriyah, E., Saiban, K., Soedjatmiko, A. P., & Laila, K. (2022). Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur. *Bhirawa Law Journal*, *3*(1), 51–57. https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7969

Setiawan, N. (2024). *Kajian Pencegahan Fraud dalam Kaidah Fiqh Dar ' ul Mafasid A Study on Fraud Prevention in the Principles of Fiqh Dar ' ul Mafasid*. *1*(2), 110–125.

Sutisna, Umi Habibah, & Rudi Hartono. (2024). Analysis of Islamic Law Compilation on Application for Child Marriage Dispensation. *Technium Education and Humanities*, *7*, 66–75. https://doi.org/10.47577/teh.v7i.10744

Suwarno, S. A. (2023). Analisis data Kinerja. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(6), 7012–7029.

Ulil Albab, M. and Hamidah, T. (2024). (2024). Pendekatan Kaidah Fikih dalam Konteks Hukum Islam Kontemporer : (Kajian Prinsip Kehati-hatian, Kemaslahatan, dan Keringanan). *Jurnal Pustaka*.